

IMPLEMENTASI ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN SEHAT

(Studi Kasus di Sebuah Kantor Desa Pandan Krajan, Kecamatan Kemlagi,
Kabupaten Mojokerto)

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ETHICS IN CREATING A CLEAN AND HEALTHY BUREAUCRACY

(Case Study in a Pandan Krajan Village Office, Kemlagi District, Mojokerto Regency)

Fauzan Rizky

Pramdityan¹

Universitas Islam

Majapahit, Indonesia¹

email:

fauzanrizky569@gmail.com

Hikmah

Muhaimin²

Universitas Islam

Majapahit, Indonesia²

email:

bambangtri635@gmail.com

Reval Bani Kesi³

Universitas Islam

Majapahit, Indonesia³

email:

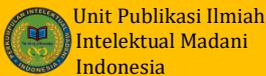
rosyidin.kh@umpo.ac.id

Abstrak: Dalam kaitannya dengan pengembangan instansi pemerintahan memberikan suatu panduan bahwasannya pembangunan instansi pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan suatu kualitas, efisiensi, dan efektivitas disemua kalangan lembaga pemerintahan, termasuk meningkatkan kapasitas dan disiplin, dedikasi, komitmen, acuan dan kesejahteraan. Secara khusus, dengan melayani, memelihara dan memelihara inisiatif masyarakat. dan berperan aktif dalam pembangunan serta menjawab kepentingan dan aspirasi masyarakat, kita akan dapat menjalankan misi dan pembangunan pemerintah semaksimal mungkin. Namun tidak sebaliknya. Pejabat pemerintah selalu berubah di masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setiap perangkat harus menyadari tujuan negara dan sadar akan keperluan masyarakat yang membutuhkan pelayanan oleh perangkat pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya. Penerapan etika pemerintahan oleh sebagian besar pejabat pemerintah berdampak langsung pada penyelenggaraan pemerintahan. Jika tindakan birokrasi dalam menjalankan tugasnya dilandasi nilai-nilai etika, maka penyelenggaraan pemerintahan akan lancar dan berhasil. Sebaliknya, jika pengoperasian perangkat menyimpang dari nilai-nilai etika, tata kelola terhambat dan timbul masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan konsep teori etika birokrasi dan perilaku birokrasi pemerintahan. Berdasarkan hasil analisis toeri dapat diketahui bahwa perilaku aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari yang ada di Kantor Desa Pandan Krajan Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto ini tergolong baik dan sehat, karena dalam menyelenggara tugas-tugas yang ada di pemerintahan Desa tersebut itu (birokrat) menggunakan etika pemerintahan dan menerapkan nilai-nilai. Sehingga birokrasi yang ada di Desa Pandan Krajan berjalan semestinya ataupun bisa dikatakan baik dan sehat dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Kata Kunci: *Etika Pemerintahan, Birokrasi, Bersih dan Sehat*

Abstrack: *In relation to the development of government agencies, it provides a guide that "The development of government agencies aims to improve quality, efficiency, and effectiveness in all levels of government institutions, including increasing capacity and discipline, dedication, commitment, reference and welfare. In particular, by serving, nurturing and nurturing community initiatives. and play an active role in development and respond to the interests and aspirations of the community, we will be able to carry out the mission and development of the government to the maximum extent possible. But not the other way around. Government officials are always changing in society in carrying*

JGPI
p-ISSN: 2774-907X
e-ISSN: 2775-0140
Vol. 2, No. 1, pp. 37-45
April 2022



out their duties and functions. Each device must be aware of the goals of the state and be aware of the needs of the community who need services by government officials according to their duties and functions. The application of government ethics by most government officials has a direct impact on the administration of government. If bureaucratic actions in carrying out their duties are based on ethical values, then the administration of government will be smooth and successful. On the other hand, if the operation of the device deviates from ethical values, governance is hampered and problems arise. This study uses a qualitative research method using the concept of bureaucratic ethics theory and government bureaucratic behavior. Based on the results of theoretical analysis, it can be seen that the behavior of government officials in carrying out their daily duties and responsibilities at the Pandan Krajan Village Office, Kemlagi District, Mojokerto Regency is classified as good and healthy because in carrying out the tasks in the village government (bureaucrats) use governance ethics and apply values. So that the bureaucracy in Pandan Krajan village runs properly or can be said to be good and healthy in carrying out the wheels of government.

Kata Kunci: Government Ethics, Bureaucracy, Clean and Healthy.

PENDAHULUAN

Persoalan mengenai etika dan perilaku birokrat belakangan ini semakin menarik perhatian berbagai kalangan. Menguatnya perhatian tersebut, sesungguhnya didasari oleh semakin maraknya fenomena yang mencerminkan buruknya etika dan perilaku aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Merebaknya kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang dan sejumlah penyimpangan perilaku diberbagai level pemerintahan mencerminkan, betapa etika dan perilaku paratur pemerintah hingga saat ini masih memprihatinkan sehingga membutuhkan penataan dan perbaikan.

Suatu etika sendiri menjadikan sebuah landasan untuk berpikir dan bertindak bagi seorang pejabat pemerintahan. Ketika suatu masyarakat luas tidak puas dan tidak terpenuhi dengan pelayanan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, mereka kemudian mengungkit-ungkit nilai dan standar etika yang digunakan oleh pejabat pemerintahan dalam memberikan suatu pelayanan tersebut, dikarena dimana suatu etika pemerintahan itu selalu menjadi problematika yang serius membutuhkan perhatian dikahalayak ramai. Etika pemerintahan tersebut menjadi poin pembicaraan di masyarakat umum ini terutama dalam upaya untuk menciptakan suatu lembaga pemerintahan yang bersih dan sehat.

Didalam sebuah dunia pemerintahan yang selalu berkaitan dengan suatu sektor pembangunan perangkat pemerintahan memberikan suatu arahan yang merujuk pada suatu “pembangunan perangkat pemerintah yang bertujuan pada peningkatan kualitas,

efisiensi dan efektivitas di seluruh jajaran penyelenggara pemerintahan termasuk juga untuk meeningkatan kemampuan terutama pada kedisiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan perangkatnya, sehingga secara tidak langsung makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang sebaik-baiknya, khususnya dalam hal melayani, mengayomi serta menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam sector pembangunan, serta peka terhadap suatu kepentingan dan aspirasi masyarakat, (Maindoka et al., 2017).

Memahami seberapa pentingnya suatu etika pemerintahan bukan hanya tentang mengajarkan suatu pejabat pemerintah apa yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan (baik-buruk; benar-salah) oleh penyelenggara pemerintahan, tetapi lebih dari itu untuk meningkatkan profesionalisme mereka dalam tindakan yang mencerminkan suatu etika yang bermanfaat bagi pelayanan kepada masyarakatnya, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat tercipta birokrasi pemerintahan yang bersih dan sehat (Maindoka et al., 2017)

Berjalanya suatu etika pemerintahan itu oleh sebagian besar perangkat pemerintahan akan berimplemetasi langsung pada sektor penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut akan berjalan dengan sangatlah lancar dan sukses apabila suatu perilaku seorang penyelenggara birokrasi yang menjalankan suatu tugasnya itu haruslah berdasarkan dengan nilai-nilai yang terdapat pada suatu etika pemerintahan. Demikian juga sebaliknya, penyelenggaraan pemerintahan akan terhambat dan bermasalah apabila perilaku aparatnya menyimpang dari nilai-nilai etika. Etika pemerintahan yang dijalankan suatu birokrasi pemerintahan akan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan ditingkat pusat maupun penyelenggaraan pemerintahan di daerah, di kecamatan bahkan juga ditingkat pedesaan. (Maindoka et al., 2017).

Upaya untuk menata dan memperbaiki etika dan perilaku aparatur di lingkungan birokrasi pemerintahan, sesungguhnya telah dilakukan baik terkait dengan penataan regulasi (peraturan) maupun pembentukan kelembagaan yang menangani masalah kode etik aparatur pemerintah, (Satibi & Ediyanto, 2020). Masalahnya kemudian, mengapa etika dan perilaku aparatur tersebut justru semakin memperlihatkan *performance* yang tidak sejalan dengan keinginan dan kehendak masyarakat. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu, perilaku aparatur ini justru lebih sering melukai perasaan dan hati nurani rakyat.

Etika dalam hal ini, dimaknai secara luas sebagai nilai-nilai ideal yang seharusnya dijadikan dasar dalam penyelenggaraan urusan publik. Berkaitan dengan aspek-aspek perilaku yang baik seperti akuntabel, responsif, transparan, bebas KKN, netral, tidak diskriminatif, sopan, dan nilai-nilai lainnya. Nilai ini yang akan menjadi pedoman bagi pejabat pemerintah (birokrat) dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat terkendali dan terlindungi dari nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai organisasi, karena etika pribadi akan mempengaruhi nilai-nilai dalam berorganisasi, (Satibi & Ediyanto, 2020).

Dikuatkan oleh Levine, (Peters dan Thompson, 1990) dengan argumen bahwa aparat birokrasi publik adalah orang-orang yang memiliki kelemahan layaknya individu lain di luar birokrasi. Dengan adanya terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan istilah "*good governance*" merupakan „*impian*“ sekaligus harapan semua bangsa di dunia. Pandangan tersebut dapat dimengerti karena melalui pelaksanaan *good governance*, upaya penciptaan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari tindakan yang tidak terpuji serta tidak berpihak pada kepentingan masyarakat diharapkan dapat diwujudkan secara nyata. Selain itu, pelaksanaan *good governance* juga akan bersentuhan atau berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah yang kemudian berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, pelaksanaan *good governance* sudah selayaknya menjadi komitmen semua untuk mewujudkannya, (Satibi & Ediyanto, 2020).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah etika pemerintahan dalam menciptakan birokrasi pemerintahan di pemerintahan Desa Pandan Krajan sudah bersih dan sehat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut (Creswell, 2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu

yang sulit untuk dipahami. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. (Maiti & Bidinger, 1981). Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2016). Jenis penelitian studi kasus ini sesuai sebagai metode untuk menjawab pertanyaan pada penelitian (Maiti & Bidinger, 1981).

HASIL DAN DISKUSI

Etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dapat dilihat pada sikap dan perilaku manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, birokrasi pemerintah dituntut untuk menghayati dan mencerminkan seperangkat nilai-nilai dalam sikap dan perilakunya serta mengembangkan diri sebagai teladan dengan moralitas yang tinggi, menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak terpuji. Hal ini yang akan meningkatkan citra aparatur pemerintah di mata masyarakat. (Lina Marliani, 2017).

Etika pemerintahan terutamanya pada sektor penyelenggaraan pemerintahan yang terdapat di sebuah Desa Pandan Krajan, bahwasanya penyelenggara pemerintah tersebut memiliki sebuah posisi yang sangat sentral didalam suatu lembaga pemerintahan Desa yang bertujuan untuk melaksanakan sebuah tugas telah ditentukan, oleh karena itu sebuah etika dalam penyelenggara pemerintahan sangatlah vital dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dari etika penyelenggara pemerintah tersebut yang bertujuan untuk membantu para pegawai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja dalam birokrasi pemerintahan Desa yang bersih dan sehat. Oleh sebab itulah bagian ini akan membahas mengenai suatu etika pemerintahan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara pemerintahan desa yang ada di sebuah Kantor Desa Pandan Krajan, serta membahas terkait dengan upaya pemerintah Desa dalam meningkatkan suatu etika pemerintahan di Desa, sehingga dapat terwujud birokrasi pemerintahan yang bersih dan sehat (Maindoka et al., 2017).

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, jujur, bersih dan berwibawa dengan kata lain tidak akan terulang lagi adanya sebuah pembusukan terkait dengan sebuah nilai-nilai etika dan moral, dan mengurangi terjadinya sebuah KKN, beberapa tawaran tentang bagaimana birokrasi ke depan dalam melayani kepentingan suatu publik. Dalam

merancang untuk menciptakan aparatur pemerintah yang memiliki kualitas dan kontribusi, serta memiliki sikap yang profesionalisme yang tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya dan kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di era globalisasi saat ini. Maka mereka dituntut akan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin dalam menjalankan segala urusan pemerintahan, agar kedepannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Banyak hal yang perlu dirangsang dan dikembangkan oleh aparatur pemerintahan, terutama dalam usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan, khususnya melalui sektor pembangunan sumber daya aparatur itu sendiri, yang dimana sebuah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai administrator pemerintahan, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat benar-benar harus mampu dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dan memberikan pelayanannya secara maksimal kepada masyarakat umum.

Kewajiban seorang pejabat pemerintah di Kantor Desa Pandan Krajan dapat dilihat dari perilaku pejabat pemerintahan dalam hal memberikan suatu pelayanan bagi masyarakatnya yakni sebuah gambaran tentang sebuah tindakan yang dilakukan aparatur pemerintah. Seorang pejabat pada melaksanakan kerjanya. Perilaku kerja ini dapat menggambarkan suatu kinerja yang dimiliki oleh seorang pejabat pemerintahan dibidang ataupun pada bagian yang ditempatinya. Perilaku kerja pejabat dalam melaksanakan tugas dalam segala bidang terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya yang diukur serta dinilai berdasarkan hasil kerjanya yang dicapai, oleh karena itu tergantung pada moral dan etika yang dimiliki oleh masing-masing pejabat pemerintahan baik atasan maupun bawahan apakah mereka mampu menjaga kemampuan kerja mereka dengan baik atau tidak.

Sebagaimana yang terjadi Kantor Desa Pandan Krajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto yang merupakan sebuah kantor dinas penyelenggara pemerintahan Desa termasuk birokrasi yang dipimpin oleh Kepala Desa. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan kepala desa di bantu oleh pegawai desa yang di sebut Kaur. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan fenomena- fenomena yang terjadi dalam mewujudkan birokrasi di pemerintahan Desa yang sehat dan bersih dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas yang dimiliki oleh pegawai Desa itu cukup baik, pegawai maupun Kepala Desa Pandan Krajan memiliki kualitas baik dalam melaksanakan tugasnya yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa yang baik dan sehat. Cukup baiknya kinerja penyelenggara pegawai

Desa Pandan Krajan (birokrat) ini diperoleh dari hasil wawancara maupun pengamatan peneliti. Dan cukup baiknya kinerja penyelenggara pegawai Desa (birokrat) sesuai dengan peraturan yang ada di UUD Negera Republik Indonesia.

Berdasarkan dari pernyataan diatas juga dapat mempengaruhi suatu pelaksanaan birokrasi pemerintahan yakni mempengaruhi proses pencapaian tujuan, proses pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan. Mengingat Birokrasi adalah merupakan kultur universal yang ada dimana saja, maka pelaksanaan Birokrasi pemerintahan di Desa Pandan Krajan perlu ditingkatkan agar dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan masyarakat akan berhasil. Untuk meningkatkan penerapan birokrasi pemerintahan, dengan adanya etika pemerintahan dalam pelaksanaan kerja aparat birokrasi yang sehat dan bersih di Kantor Desa Pandan Krajan, sebab tanpa adanya etika pemerintahan maka pelaksanaan tugas kerja birokrasi di Desa akan mengalami hambatan, etika pemerintahan yang dimaksudkan disini berupa penerapan perangkat peraturan perundang undangan yang berlaku agar perilaku birokrat taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditentukan seperti, disiplin bagi pegawai/aparatur pemerintah, pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas yang dianggap, (Maindoka et al., 2017).

Adanya sejumlah argumen mengapa etika birokrasi vital untuk diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang bersih, tanggap, akuntabel, sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang professional, yaitu, *Pertama*, masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah dimasa mendatang akan semakin kompleks. Modernitas masyarakat yang semakin meningkat telah melahirkan berbagai masalah-masalah publik yang semakin banyak dan kompleks dan harus diselesaikan oleh birokrasi pemerintah. Dalam memecahkan masalah yang berkembang birokrasi seringkali tidak dihadapkan tentang pilihan yang jelas seperti baik dan buruk. Para apatarur birokrasi sering tidak dihadapkan pada situasi pilihan yang sulit, antara baik dan baik, yang masing-masing memiliki implikasi yang saling berbenturan satu sama lain. Dalam kasus pembebasan tanah, misalnya pilihan yang dihadapi oleh para pejabat birokrasi seringkali bersifat terbagi dan dilematis. Mereka harus memilih antara memperjuangkan program pemerintah dan memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Masalah-masalah yang ada dalam "*grey area*" seperti ini akan menjadi semakin banyak dan kompleks seiring dengan meningkatnya modernitas masyarakat. Pengembangan etika birokrasi mungkin bisa fungsional terutama dalam memberi *policy guidance* kepada para pejabat birokrat untuk

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. *Kedua*, keberhasilan pembangunan telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Dinamika yang terjadi dalam lingkungan tentunya menuntut kemampuan birokrasi untuk melakukan *adjustment* agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Kemampuan untuk bisa melakukan *adjustment* itu menuntut *discretionary power* yang besar. Penggunaan kekuasaan direksi ini hanya akan dapat dilakukan dengan baik kalau birokrasi memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai besarnya kekuasaan yang dimiliki dan implikasi dari penggunaan kekuasaan itu bagi kepentingan masyarakat. Pemahaman dan pengetahuan yang tinggi mengenai kedaulatan serta gambaran penggunaan kekuasaan itu hanya dapat dilakukan melalui pengembangan etika birokrasi. Walaupun pengembangan etika birokrasi sangat penting bagi pengembangan birokrasi namun belum banyak usaha itu dilakukan untuk mengembangkannya. Selama ini hanya lembaga peradilan dan kesehatan yang memiliki kemajuan dalam pengembangan etika, sebagaimana tercermin dalam etika kedokteran dan hukum. Etika tersebut bisa jadi salah satu sumber tuntunan bagi para professional dalam pelaksanaan pekerjaan mereka. Pengembangan etika birokrasi ini tentunya menjadi tantangan bagi ilmuwan dan praktisi administrasi publik dan semua pihak yang menginginkan perbaikan kualitas kualitas birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia.(Maindoka et al., 2017).

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, sebagian besar instansi pemerintah di Desa Pandan Krajan memahami dan menghayati bahkan mengamalkan prinsip-prinsip etika pemerintahan, namun ada juga yang tidak memahami dan tidak menerapkan etika pemerintahant, (Maindoka et al., 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan bahwa perilaku aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari yang ada di Kantor Desa Pandan Krajan Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto ini tergolong baik dan sehat dikarenakan dalam menyelenggara tugas-tugas yang ada di pemerintahan Desa tersebut itu (birokrat) menggunakan etika pemerintahan dan menerapkan nilai-nilai. Sehingga birokrasi yang ada di Desa Pandan Krajan berjalan semestinya ataupun bisa dikatakan baik dan sehat dalam menjalankan roda pemerintahannya.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Levine, Charles, H. Peters, Guy, P. dan Thompson, Frank J. 1990. *Public Administration: Challenges, Choice and Consequences*, Illinois: Scott Foresman/ Little.
- Lina Marliani. (2017). Penerapan Nilai-Nilai Etika Bagi Birokrasi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Vol 4, No, 542-547. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/875/784>.
- Maindoka, M. C., Kaunang, M., & Gosal, T. A. M. R. (2017). Etika Pemerintahan Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Bersih (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1-11.
- Maiti, & Bidinger. (1981). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Satibi, Iwan dan Ediyanto. (2020). Etika dan Perilaku Birokrasi Dalam Mendukung Penguatan Good Governance. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 234-260. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.173>.